

## PERAN NU DALAM MENANGGULANGI KONFLIK SANTET DI KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 1998

I Kadek Yudiana<sup>1</sup>, Mahfud<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Pendidikan Sejarah Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi

email: [ikadekyudiana@untag-banyuwangi.ac.id](mailto:ikadekyudiana@untag-banyuwangi.ac.id)<sup>1</sup>, [mahfud@untag-banyuwangi.ac.id](mailto:mahfud@untag-banyuwangi.ac.id)<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan Untuk: 1) menganalisis menjadi latar belakang terjadinya tragedi dukun santet di Banyuwangi tahun 1998; 2) Peran NU dalam menanggulangi tragedy dukun santet di Kabupaten Banyuwangi tahun 1998. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tahapan, yaitu: 1) penentuan lokasi penelitian, metode penentuan informan, metode pengumpulan data, instrumen penelitian, metode pengujian keabsahan data, dan metode analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Santet tidak dapat dilepaskan dari sejarah terbentuknya komunitas masyarakat suku Osing. Jumlah korban dalam peristiwa ini belum pasti, berdasarkan data yang ditemukan terdapat perbedaan, yaitu Data dari KOMPAK atau Komunitas Pencari Keadilan, sebuah tim pencari fakta dari LSM dan tokoh masyarakat Banyuwangi menyebut, korbannya mencapai 174 orang. Sementara, Tim Pencari Fakta Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur mencatat ada 147 orang. Sedangkan Pemkab Banyuwangi, 103 orang. Peran NU dalam peristiwa ini ada beberapa analisis yaitu terkait dengan politik Gusdur yang selalu mengkritisi pemerintahan Orba sehingga dalam hal ini NU lebih tepat hanya sebagai korban dari konspirasi tersebut. dalam hal ini NU juga berperan dalam mengumpulkan fakta terkait dengan jumlah korban.

**Kata Kunci:** NU, Santett, Dukun, Banyuwangi

### PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia hidup dalam sebuah masyarakat majemuk (*plural society*), yaitu sebuah masyarakat negara yang terwujud dari dipersatukannya masyarakat-masyarakat suku bangsa oleh sistem nasional menjadi sebuah bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Handoyo, dkk, 2015: 22). Adanya kemajemukan merupakan suatu rahmat yang patut untuk disyukuri, akan tetapi sekaligus merupakan suatu tantangan bagi bangsa Indonesia. Masyarakat majemuk yang tersusun oleh keragaman kelompok etnik (*etnik group*), agama beserta tradisi dan budayanya, tidak hanya berpeluang menjadikan bangsa Indonesia menjadi sebuah bangsa yang kuat di masa mendatang, tetapi juga berpotensi mendorong timbulnya konflik sosial yang dapat mengancam sendi-sendi integrasi negara-bangsa (*nation-state*), jika dinamika kemajemukan sosial budaya tidak dapat dikelola dengan baik. Kegagalan dalam mengelola potensi kemajemukan dan pluralitas dapat menyebabkan berbagai ketegangan, permusuhan dan konflik yang tidak berujung pangkal, bahkan bukan tidak mungkin terjadi segregasi dan disintegrasi (Handoyo, dkk, 2015: 23).

Dalam pen-*takdir*-annya masyarakat majemuk (*plural society*), pemerintah dan masyarakat Indonesia masih harus belajar banyak dari sejarah perjalanan bangsanya sendiri tentang bagaimana mengelola kemajemukan tersebut agar menjadi modal sosial pembangunan bangsa. Banyuwangi merupakan kabupaten yang berada di ujung paling timur Pulau Jawa, sekaligus merupakan kabupaten terluas yang ada di Provinsi Jawa

Timur. Banyuwangi juga merupakan daerah yang sangat multikultur, yang ditandai dengan keragaman etnis, agama dan budaya yang berbeda-beda. Namun walaupun masyarakatnya multikultur, masyarakat Banyuwangi tetap menjunjung tinggi kepedulian antarsesama dalam aktivitas sehari-hari mereka, hal tersebut dipegang kuat karena dianggap efektif dalam menjaga kerukunan sehingga keberadaan nilai tersebut mampu mempengaruhi masyarakat dalam menjaga harmonisasi dalam kemultikulturan masyarakatnya (Hanifah, 2015: 2).

Salah satu bukti prestasi kesuksesan Kabupaten Banyuwangi dalam mengelola kemultikulturan masyarakatnya adalah dengan diraihnya "*Harmony Award*" atau Anugerah Kerukunan Umat Beragama dari Kementerian Agama karena dinilai mampu mewujudkan kerukunan antarumat beragama dan mampu mengelola perbedaan dengan bijak. *Harmony Award* merupakan penghargaan dari Kementerian Agama kepada pemerintah daerah yang dinilai telah mendukung dan memiliki hasil kerja terkait pelayanan kepada seluruh agama, serta turut menjaga kerukunan antarumat beragama di masing-masing daerah.

Peran dari berbagai macam organisasi kepemudaan juga memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam menciptakan suasana yang harmonis, toleran dan rukun di Banyuwangi. Salah satu organisasi kepemudaan yang telah ikut memberikan andil besar dalam menjaga kerukunan antarumat beragama di Kabupaten Banyuwangi adalah Gerakan Nahdathul Ulama. Gerakan Nahdathul Ulama adalah organisasi kemasyarakatan pemuda di Indonesia yang memiliki watak kepemudaan, kerakyatan, keislaman dan kebangsaan, sehingga tidak mengherankan jika dalam aktivitas kemasyarakatannya selalu mengedepankan prinsip toleransi, keseimbangan, jalan tengah dan prinsip keadilan (Khaidar, 2004: 107). Seperti contohnya Banser GP Anzor dan Pecalang di Desa Patoman, Kecamatan Blimbingsari secara kompak turun ke lapangan mengamankan hari raya Nyepi pada tahun 2017, kemudian pada tahun 2016 Gerakan Pemuda (GP) Anzor Banyuwangi, dan melalui Forum Kebangsaan Pemuda Banyuwangi (FKPB) juga ikut aktif dalam kegiatan dialog-dialog lintas agama untuk menciptakan toleransi dan harmoni di Kabupaten Banyuwangi.

Apa yang ditunjukkan oleh Gerakan Nahdathul Ulama di Banyuwangi dan di daerah-daerah lainnya di Indonesia, berbanding terbalik dengan realitas organisasi-organisasi kemasyarakatan lainnya yang cenderung radikal dan tidak mencerminkan nilai-nilai toleransi, serta cenderung mengarah ke premanisme. Contohnya konflik FPI (Front Pembela Islam) dan GMBI (Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia) pada 20 Januari 2017, merupakan contoh konflik antarormas di Indonesia yang tidak mencerminkan sikap-sikap humanisme dalam menyelesaikan masalah (Suratman, 2017: 47). Di satu sisi memang kemultikulturan yang ada di Indonesia dan di Banyuwangi pada khususnya bisa menjadi kekuatan konstruktif produktif dalam rangka membangun bangsa. Namun, di sisi lainnya jika heterogenitas kebangsaan itu tidak bisa dikelola dengan baik, maka ia bisa menjelma menjadi kekuatan destruktif yang bisa mencabik-cabik bangunan kebangsaan yang sudah sedemikian lama dibangun di bawah panji-panji Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Apalagi kehidupan umat beragama di Indonesia sekarang ini kembali diuji dengan munculnya gejala-gejala dan kejadian-kejadian kekerasan atas nama agama. Sjoraida, dkk (2016: 241) menguraikan tentang contoh-contoh konflik antar dan intern umat beragama yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini, yaitu kasus bentrokan dan kekerasan atas nama agama terjadi di Cikeusik Pandeglang Banten, antara penganut Ahmadiyah dengan umat Islam (Islam *mainstream*), bentrokan dan kekerasan yang

terjadi antara penganut Protestan dan umat Islam di Temanggung Jawa Tengah dan Medan, kasus pengusiran yang terjadi di Kabupaten Sampang, Madura Jawa Timur yang dilakukan oleh warga Madura terhadap pengikut Islam Syi'ah dan di daerah-daerah lainnya, seperti Maluku, Bekasi, Tasikmalaya dan Kuningan. Kemudian, pada tahun 2015 lalu juga terjadi konflik di Tolikara Papua, yang ditandai dengan penyerangan pada umat Islam setelah menunaikan Sholat. Akhirnya masyarakat Indonesia juga tidak dapat menutup mata dengan panasnya tensi Pilkada DKI karena isu SARA membayangnya berpotensi memicu konflik berskala nasional.

Berdasarkan kenyataan di atas, menyimak kerawanan konflik antarumat beragama di Indonesia bukanlah hanya sekedar ketakutan belaka, melainkan sudah kerap kali terjadi di Indonesia. Oleh sebab itu, sudah seyakinya bangsa Indonesia harus menjadikan pengalaman Uni Soviet dan Yugoslavia sebagai "*kacabenggala*" bagi penataan kehidupan multikulturalitas kebangsaan kita. Kehancuran kedua negara besar tersebut terletak pada ketidakmampuan mereka mengelola kemajemukan yang ada, maka jadilah Uni Soviet dan Yugoslavia hanya sebagai puing-puing yang tidak lagi eksis di peta dunia ini. Berdasarkan latar belakang di atas, maka upaya pengkajian terhadap eksistensi peran Gerakan Nahdathul Ulama dalam mengelola kerukunan antarumat beragama di Kabupaten Banyuwangi merupakan langkah penting untuk segera dilaksanakan, agar pengalaman dan cara Gerakan Nahdathul Ulama dapat dijadikan contoh nyata bagi organisasi-organisasi yang berhaluan keagamaan dalam menyikapi segala perbedaan yang ada di Indonesia, sehingga mampu menciptakan harmoni dalam keberagaman.

## METODE PENELITIAN

### Penentuan Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan Kabupaten Banyuwangi. Adapun pertimbangan pemilihan Kabupaten Banyuwangi sebagai lokasi penelitian antara lain: 1) Kabupaten Banyuwangi merupakan kabupaten yang multireligi, yang ditandai dengan keragaman agama yang dipercayai oleh masing-masing masyarakatnya, 2) Di Kabupaten Banyuwangi tidak pernah terjadi konflik bernuansa agama hingga akhir tahun 2017, 3) Kabupaten Banyuwangi "*Harmony Award*" atau Anugerah Kerukunan Umat Beragama dari Kementerian Agama karena dinilai mampu mewujudkan kerukunan antarumat beragama dan mampu mengelola perbedaan dengan bijak, 4) Gerakan Nahdathul Ulama sebagai salah satu organisasi kepemudaan di bawah bendera Nahdathul Ulama secara konsisten tetap memperjuangkan dan menjaga sikap dan sifat toleransi di Kabupaten Banyuwangi antarpemeluk agama.

### Metode Penentuan Informan

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yakni pemilihan informan atau sampel yang sesuai dengan tujuan peneliti (Sugiyono, 2009: 216). Adapun yang direncanakan menjadi informan dalam penelitian ini adalah Ketua Umum (Ketum) Pengurus Cabang Gerakan Pemuda (PC GP) *Ansor* Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, beserta pengurus dan anggotanya, Ketua PCNU Banyuwangi, pemerintah daerah, tokoh-tokoh agama di Kabupaten Banyuwangi, dan masyarakat Kanyuwangi.

### Metode Pengumpulan Data

#### a. Teknik Observasi

Teknik observasi merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung

(Sukmadinata, 2009: 220). Adapun dalam penelitian ini yang akan diobservasi adalah lingkungan dan keadaan fisik tempat-tempat ibadah yang ada di Kabupaten Banyuwangi, umat beragama di Kabupaten Banyuwangi, dan kegiatan Gerakan Nahdathul Ulama dalam menjaga kerukunan antarumat bergama di Kabupaten Banyuwangi, serta nilai-nilai pendidikan karakter yang terkandung di dalam eksistensi Gerakan Nahdathul Ulama dalam menjaga kerukunan antarumat beragama di Kabupaten Banyuwangi.

b. Teknik Wawancara

Wawancara (*interview*) merupakan teknik pengumpulan data untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui percakapan dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada peneliti (Sarosa, 2012: 45). Adapun dalam penelitian ini aspek-aspek yang akan menjadi fokus wawancara antara lain adalah pengurus cabang GP ansor beserta anggotanya dan masyarakat sekitar yang terlibat didalamnya.

c. Teknik Studi Dokumen

Teknik studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis maupun dokumen elektronik maupun elektronik (Sukmadinata, 2009: 221). Dokumen-dokumen yang akan digunakan dalam PKM penelitian ini adalah buku, artikel, jurnal, berita online, koran, dan majalah yang terkait dengan kegiatan Gerakan Nahdathul Ulama dalam menjaga kerukunan antarumat bergama di Kabupaten Banyuwangi.

### Metode Pengujian Keabsahan Data

Metode pengujian keabsahan data yang peneliti gunakan adalah 1) *Triangulasi Sumber Data*, adalah teknik yang dilakukan dengan membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan cara yang berbeda dalam metode kualitatif. Caranya adalah (a) Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara, (b) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, (c) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu, (d) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. 2) *Triangulasi Metode*, adalah teknik yang dilakukan dengan mengumpulkan data sejenis dengan menggunakan metode yang berbeda. Triangulasi metode dilakukan dengan menggunakan strategi (a) Pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data, (b) Pengecekan beberapa sumber data dengan metode yang sama. 3) *Triangulasi Teori*, adalah teknik triangulasi yang dilakukan dengan menggunakan pola, hubungan, dan menyertakan penjelasan yang muncul dari analisis untuk mencari tema atau penjelasan pembanding (Bungin, 2009: 256-257).

### Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2009: 244). Menurut Miles and Huberman dalam Sugiyono (2009: 246), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu reduksi data, display data dan kesimpulan.

- 1) Reduksi data, adalah kegiatan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya (Sugiyono, 2009: 247). Jadi laporan lapangan disusun lebih sistematis, ditonjolkan pokok-pokok yang penting, sehingga lebih mudah dikendalikan dan data yang sudah direduksi akan memberi gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan.
- 2) Display data/penyajian data, dengan mendisplaykan data maka akan lebih memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut (Sugiyono, 2009: 249).
- 3) Mengambil kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada, temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori (Sugiyono, 2009: 253).

## PEMBAHASAN

### Pergeseran Makna Santet Suku Osing

Santet tidak dapat dilepaskan dari sejarah terbentuknya komunitas masyarakat suku Osing. Santet diperkirakan berkembang setelah adanya Perang Puputan Bayu (1771-1772). Pada waktu itu puluhan ribu pasukan Blambangan gugur di medan perang melawan penjajah Belanda yang dibantu laskar Bali dan Mataram. Dari empat puluh ribu penduduk Kadipaten Blambangan yang tertinggal hanya lima ribu orang. Mereka menyingkir ke hutan-hutan. Setelah pertempuran mereda, Mas Alit, Bupati pertama Banyuwangi menghimbau mereka untuk turun gunung menghentikan peperangan dan kembali membentuk perkampungan. Kisah ini digambarkan dalam *Sekar Jenang*, syair kuno simbolik khas Banyuwangi. Pada akhirnya rakyat patuh pada himbauan Bupati Mas Alit, tetapi dendam mereka terhadap orang asing baik Belanda, Mataram, dan Bali tetap mengakar. Mereka tidak mau bercampur darah dengan orang luar. Oleh sebab itu, untuk mengukuhkan tali ikatan persaudaraan di antara kerabat sendiri perijodohan dilakukan melalui pertemuan pergaulan pria dan wanita dalam acara *gredohan* tiap bulan *Maulid* atau *Warung Bathokan*. Jika tidak membuahkan hasil, maka dilakukan tindakan dengan memakai santet sebagai alat pemikat. Hal tersebut juga dibenarkan oleh beberapa narasumber diantaranya Ust. Firdaus (58 tahun), Hasan (72 tahun), Jumain (70) dan ust. Ayung (30 tahun) yang menyatakan bahwa “santet sendiri sebenarnya adalah ilmu pengasih untuk memikat lawan jenis, dan bukan untuk untuk membunuh orang”.

Kemudian, istilah santet ini dalam kehidupan masyarakat Banyuwangi digambarkan dalam bentuk tari *Jaran Goyang*, yang merupakan salah satu seni tradisional yang proses kelahirannya diilhami oleh tari *Seblang* dan *Gandrung*. *Jaran Goyang* terdiri dari kata *Jaran* (Kuda) dan *Goyang* (bergerak). Tarian *Jaran Goyang* ini dianggap mengandung unsur kekuatan gaib, namun banyak digemari oleh masyarakat terutama remaja karena membawa motif kehidupan asmara remaja. Tarian *Jaran Goyang* melambangkan adanya seorang gadis yang tiba-tiba menjadi tidak sadar akibat guna-guna dari seorang jejaka. Si gadis menjadi tidak stabil ingatannya lantaran dibuat tidak sadar (diguna-guna) oleh jejaka. Realitas yang disimbolkan oleh tarian ini begitu melegenda dan masyarakat Banyuwangi menggambarkan si gadis yang tidak sadar sebagai telah terkena ajian *Jaran Goyang*.

Sekarang pengertian santet telah mengalami pergeseran makna, sehingga dianggap sejajar dengan *tenung* atau sihir yang mencederai atau mencelakai orang. Bahkan, sekarang di Banyuwangi terdapat empat kategori ilmu sihir yang dilambangkan dengan empat warna, yaitu hitam, kuning, merah dan putih. Sihir Hitam biasanya untuk keperluan kejahatan berat dan tak jarang sampai menimbulkan kematian. Misalnya *Bantal Nyawa, Bantal Kancing, Cekak, Cebul, Cekek* dan *Setan Kuburan*. Sihir Kuning dan Merah berhubungan dengan masalah pengasih dan seksualitas. Sihir kuning antara lain *Jaran Goyang, Semut Gatel, Bantal Guling, Gombal Kobong* dan *polong Doro*. Sihir putih lebih mengarah pada upaya untuk menetralsisir semua dampak negatif yang disebabkan dari sihir lainnya.

Pada perkembangan selanjutnya, masyarakat Osing memiliki kebiasaan datang ke dukun santet ketika mereka memiliki masalah pribadi yang terkait dengan orang lain, seperti sakit hati, dendam sampai percekocokan kecil dengan tetangga atau teman, maka tak segan-segan memanfaatkan jasa dukun santet. Peran dukun santet (melalui media gaib) menjadi sangat dominan dalam menyakiti orang lain. Keberadaan dukun santet sangat dihormati oleh orang lain yang menggunakan jasa untuk membalas rasa sakit hatinya, tetapi sangat dibenci atau ditakuti oleh orang yang menjadi korban/mayoritas masyarakat Banyuwangi.

### **Kronologis Peristiwa Pembunuhan Massal Berkedok Dukun Santet**

Banyuwangi adalah pintu utama untuk memasuki Pulau Dewata sebagai daerah penghasil devisa neraca di sektor pariwisata. Selain letaknya yang strategis, Banyuwangi juga dikenal sebagai daerah yang tanahnya subur. Aroma kopi, cengkeh, coklat, karet, pisang, kelapa, dan sayur-sayuran tumbuh di setiap jengkal tanah, menjadikan daerah *Menak Jinggo*

ini tergolong *gemah ripah loh jinawi*. Budaya gotong royong masyarakatnya cukup tinggi. Terlebih semangat hidup keberagamannya yang mampu hidup tentram dan damai. Ini terlihat dari masyarakatnya yang multi agama, suku, ras dan golongan, yang mampu hidup berdampingan dengan harmonis satu sama lainnya. Namun, Banyuwangi yang tentram dan damai tiba-tiba berubah menjadi mencekam, menakutkan, dan berdarah-darah dengan adanya peristiwa pembunuhan massal terhadap orang yang dicurigai sebagai dukun santet pada tahun 1998 atau jika meminjam istilah Manan, dkk (2001: 4) "Banyuwangi telah menjadi ladang pembantaian terhadap dukun santet".

Pada awalnya masyarakat menganggap dukun santet memiliki perilaku yang sangat biadab. Efek kekejaman yang ditimbulkan oleh dukun santet sangat mengerikan. Para dukun santet tega menghabisi nyawa orang lain, bahkan istri, suami dan anak-anaknya hanya dengan alasan ilmunya pada periode tertentu harus memakan korban atau atas pesanan seseorang. Awalnya masyarakat masih belum berani untuk melawan keberadaan dukun santet sebagai akibat pembunuhan yang diakibatkan oleh kekejaman dukun santet terhadap korbannya yang tidak berdosa. Namun seiring dengan bergulirnya waktu dan adanya peristiwa demi peristiwa kasus penyantetan pada korban, maka selanjutnya para keluarga korban dan masyarakat menyatakan perasaan bencinya tersebut terhadap dukun santet. Aktualisasi perasaan benci tersebut adalah berbentuk aksi kolektif membunuh dukun santet. Dalam keadaan demikian dukun santet telah dianggap sebagai musuh bersama oleh masyarakat. Hal tersebut di atas seperti yang dijelaskan oleh Herriman (2013: 76) bahwa "bagi penduduk di desa-desa di

Banyuwangi, dukun santet dipercaya merupakan ancaman yang kronis dan dekat dengan diri mereka”.

Oleh karena itu, kematian beberapa dukun santet di Kabupaten Banyuwangi ditanggapi dengan biasa-biasa saja, bahkan boleh dikatakan sebagian besar masyarakat setuju dengan pembunuhan dukun santet tersebut. Menurut Saiful Rahim, selama tujuh tahun ada belasan orang yang dikenal sebagai dukun santet dibunuh di daerah Banyuwangi.

“Pada tahun 1996 pun terjadi aksi pembunuhan terhadap dukun santet (sihir). Peristiwa yang terjadi pertengahan 1996 itu meminta korban sekitar 30-an orang yang diduga dukun santet (sihir). Karena itu, ketika pertama kali terjadi pembantaian atas beberapa orang yang diperkenalkan sebagai dukun santet (sihir) tidak mengambil pusing oleh orang Banyuwangi” (Rahim, 1998: 6).

Rentetan pembunuhan mulai dirasa tidak biasa ketika aksi yang semula terjadi di basis dukun santet, Kecamatan Rogojampi, Kabat, dan Glagah, mulai merembet ke wilayah lain. Rembetan inilah yang menjadi kekhawatiran masyarakat. Peristiwa meningkat dari 5 kasus di bulan Juli, membengkak menjadi 47 kasus di bulan Agustus dan bertambah menjadi 80 kasus pada bulan September. Pada waktu yang sama, terror maut itu melebar ke daerah-daerah lain dan ketika pembunuhan itu mencapai puncaknya pada bulan September dan Oktober, satu isu baru muncul, yaitu isu ninja.

Genosida terhadap orang-orang yang diduga sebagai dukun santet ini dimulai ketika pada tanggal 6 Februari 1998 Bupati Banyuwangi, Purnomo Sidik mengeluarkan instruksi agar Camat mendata paranormal, dukun pengobatan tradisional, dan tukang sihir dengan alasan untuk memudahkan penanganan kalau nanti terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Radiogram ini sendiri pada pokoknya memerintahkan kepada semua Camat agar segera menginstruksikan kepada Kepala Desa (Kades) maupun Lurah untuk mendata orang yang melakukan praktek ilmu gaib tersebut di wilayah masing-masing.

“Pendataan ini disertai dengan cap jempol dan foto bagi mereka yang diduga dukun santet tersebut dilakukan oleh aparat keamanan. Tujuan pendataan tersebut adalah untuk melindungi mereka yang tertuduh dari ancaman maut, amuk massa, dan ancaman masyarakat. Oleh karena itu, selain dilindungi mereka juga disarankan untuk transmigrasi, serta bagi yang mau bertransmigrasi, pemerintah akan membantu segalanya” seperti yang dijelaskan oleh Al-Zastrauw Ng., (1999: 103-104).

Herriman (2013: 95) menjelaskan asal mula dari Radiogram Bupati tersebut, yaitu sebagai berikut:

“...seorang dukun santet bernama Marno dibunuh di Kecamatan Genteng pada tanggal 4 Februari 1998. Tampaknya sekalipun hal ini biasa, dua hari kemudian, kepala pemerintahan di Banyuwangi, yaitu bupati, mengambil langkah yang luar biasa. Laporan mengenai kata-kata persisnya tidak jelas, tapi sepertinya jelas bahwa dia memutuskan bahwa semua orang yang dituduh dukun santet sebaiknya diberi kesempatan untuk transmigrasi. Pesan ini disampaikan melalui radiogram.” (Isi Radiogram secara lebih jelas dapat dilihat pada bagian lampiran).

Adanya Radiogram tersebut menimbulkan praduga bahwa Bupatiah dalang pembunuhan ini. Meskipun, Bupati malah berpendapat bahwa radiogram ini bertujuan untuk mengevakuasi orang-orang yang diduga sebagai dukun santet atau dengan kata lain Bupati menghendaki tidak terjadi kekacauan dan pembunuhan di wilayah kekuasaannya. Namun, akhirnya data itu bocor (sengaja dibocorkan?) dan tersebar luas pada masyarakat dan ironisnya daftar kematian inilah yang menjadi acuan kerja para kawanan ninja dalam melakukan teror dan pembunuhan (Sukidin, 2005: 134-135).

Secara lebih lengkap, berikut ini kronologis peristiwa pembunuhan massal berkedok dukun santet di Kabupaten Banyuwangi menurut Tim Pencari Fakta NU dikutip dalam Al-Zastrauw Ng. (1999: 98-103), yaitu sebagai berikut.

1. Pada bulan Februari tahun 1908, Bupati Banyuwangi, Pornomosidik, mengeluarkan instruksi agar seluruh Camat mendata paranormal, dukun pengobatan tradisional dan tukang sihir (santet) dengan alasan untuk memudahkan jika nanti terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Instruksi tersebut segera dilaksanakan oleh Muspika dari seluruh Kades di wilayahnya pada 11 Februari 1998. Camat Purwoharjo memang membantah instruksi Bupati. Menurutnya, pendataan itu perintah dari Polsek Purwoharjo yang mendapat perintah dari atasannya. Namun bantahan Camat tersebut dibantah oleh Imaduddin (Kepala KUA). Imaduddin, yang dikenal tidak pernah bohong, menuliskan dalam notulen rapat, bahwa rapat pada 11 Februari 1998 itu berdasar pada radiogram Bupati Banyuwangi. Terlepas dari perbantahan mereka yang jelas dari pendataan inilah kemudian tersebar isu akan adanya pembantaian dukun santet secara besar-besaran.
2. Setelah instruksi pertama, Bupati Purnomosidik mengeluarkan instruksi lagi yang kedua pada 17 September 1998. Instruksi kedua ini bernada mencegah pembunuhan dukun santet, dan langsung ditindaklanjuti Camat Glagah dalam bentuk perintah Kades se-Kecamatan Glagah untuk mengadakan koordinasi, dan mengirim data tukang sihir selambat-lambatnya tanggal 21 September 1998.
3. Dalam bulan Februari 1998, Danramil Kalipuro (rekan Abdul Malik) melakukan pendataan orang-orang yang diduga sebagai tukang sihir di wilayahnya. Hasil pendataan itu sempat dikemukakan Danramil dalam sebuah pertemuan dengan tokoh masyarakat pada Mei 1998. Intinya, untuk Kecamatan Kalipuro (terdiri dari 5 desa), tercatat 113 orang dukun santet. Jumlah ini merupakan jumlah yang paling besar dibandingkan jumlah tukang sihir di 21 kecamatan lainnya yang ada di Banyuwangi. Selang dua bulan setelah Danramil mengumumkan hal itu, pada bulan Juli 1998, Danramil jatuh sakit sehingga isu Danramil kena santet merebak ke mana-mana. Namun akhirnya bisa disembuhkan.
4. Tidak lama setelah pendataan di Kalipuro, beredar selebaran dan desas-desus mengenai terbentuknya organisasi Gerakan Anti Tenung (*Gantung*). TPF NU menemukan insikasi keterlibatan seorang anggota DPRD Banyuwangi. Indikasi ini berdasar pada kebiasaan orang tersebut membuat selebaran gelap (indikasi ini belum cukup kuat dijadikan dasar hukum). Isu Gantung itu meresahkan masyarakat Banyuwangi, sebab fakta di lapangan menunjukkan berita mengenai Gantung ini sampai ke desa-desa disertai daftar nama orang yang akan dibunuh.
5. Pada 10 Februari 1998, Kapolsek Rogojampi mengundang beberapa orang yang diduga dukun santet untuk diberi pengarahan dan pembinaan mengenai siskamling. Tetapi ternyata bukan sekedar pengarahan. Mereka yang datang disuruh cap jempol dan difoto. Semua yang datang memenuhi undangan itu sampai saat ini (saat laporan TPF dibuat) lenyap tanpa jejak. Ada seorang yang masih hidup karena berusaha

menyelamatkan diri ketika rumahnya diserbu dan dirusak massa. Dan anehnya, penyampaian undangan kepada Kaur Agama Desa Sukodono untuk disampaikan kepada mereka yang diduga dukun santet itu, petugasnya justru memakai topeng *ala ninja*.

Pada bulan September dan Oktober keadaan teror maut di Banyuwangi meningkat menjadi lebih parah. Kota Banyuwangi serta desa-desa sekitarnya betul-betul diselimuti ketakutan, layaknya seperti dalam keadaan perang. Pada saat itu, orang-orang terlalu takut untuk pergi dari rumahnya pada malam hari dan hanya memasak sendiri di dapur mereka. Pengamanan swakarsa dan siskamling dibentuk di mana-mana supaya dapat melindungi kyai-kyai di pesantren serta masyarakat dari kejahatan ninja. Hal tersebut bisa dimengerti sebab kehidupan yang semula berjalan normal mulai dihantui oleh perasaan mencekam dan suasana teror. Suasana tersebut tergambar melalui kutipan dari Sukidin (2005: 10), yaitu sebagai berikut:

“Begitu malam tiba di Banyuwangi, Jember, hingga Lumajang, kampung-kampung langsung sepi. Jalan umum dibarikade drum dan kawat berduri, sementara para peronda bersiaga dengan senjata di tangan. Di beberapa tempat, sholat berjamaah dilakukan seolah situasi perang, satu kelompok menunaikan sholat, sementara yang lain berjaga-jaga. Kecurigaan terhadap orang asing pun menjadi-jadi”.

Hal tersebut serupa dengan penjelasan Bapak Hasan (72 tahun) yang menjelaskan bahwa “...kondisi desa saya sangat sepi dan sunyi ketika senja mulai datang’ (Hasil wawancara tanggal 16 Mei 2017). Seiring dengan munculnya isu ninja, misteri gaib dukun santet akhirnya kian memudar, dengan cepat berubah menjadi misteri politik yang membingungkan. Karena sekarang, bukan hanya dukun sihir yang dibunuh tetapi kyai dan tokoh ulama, serta guru mengaji menjadi sasaran teror. Isu ninja sebagai para pembunuh melebar ke seluruh tanah Jawa Timur, ke Jawa Tengah dan Pulau Madura. Hal di atas juga dibenarkan oleh Ust. Firdaus (58) yang menyatakan bahwa:

“...kasus tersebut diawali dengan adanya amukan massa terhadap orang yang memiliki ilmu hitam berupa santet hingga si tukang tenun tersemut meninggal. Setelah itu ada pihak ketiga yang berinisial ninja juga ikut membunuh orang yang dicurigai mempunyai ilmu hitam (santet)”. Bahkan, kebanyakan yang menjadi korban pembunuhan tersebut adalah guru ngaji dan tokoh agama dan ada juga masyarakat biasa (Hasil wawancara tanggal 14 Mei 2017).

Dalam praktek peristiwa pembunuhan massal terhadap orang yang dicurigai sebagai dukun santet pada tahun 1998 menunjukkan bahwa pembantaian ini dilakukan oleh sekelompok orang terkatih, dibantu tenaga pengatur strategi, penyandang dana, dan provokator-provokator penggerak massa serta cara kerjanya terkesan rapi. Hal tersebut seperti yang dijelaskan oleh Bapak Jumai’in (70 tahun) (mantan Ketua Preman) yang menyatakan bahwa pembantaian tersebut dilakukan oleh “...pembunuh bayaran dari luar desa yang status orang tersebut sudah terlatih (preman)” (hasil wawancara tanggal 28 Juni 2017). Mula-mula petugas provokator mempengaruhi massa. Setelah massa berhasil dipengaruhi, langsung diberi tahu jadwal pembantaian lengkap dengan jam dan harinya. Bahkan tanda-tanda agar tidak terjadi salah ambil calon korban, juga diberi tahu dari mulut ke mulut.

Tanda-tanda ini, biasanya, menggunakan bunyi kentongan atau tiang listrik yang dipukul untuk menandai padamnya lampu. Dengan begitu, hanya lampu rumah calon korban saja yang menyala, karena sudah diwanti-wanti agar tidak member tahu sandi tersebut pada calon korban. Ini juga untuk memudahkan petugas eksekutor (algojo) mengambil calon korbannya dari rumah. Para algojo selalu menggunakan topeng dan berpakaian serba hitam *ala ninja* sehingga penduduk setempat tidak pernah tahu siapa sebenarnya mereka. Setelah korban dihabisi, biasanya diseret ke tengah massa, atau yang bisa diperdaya digiring ke tengah massa untuk dibantai ramai-ramai.

### **Dampak Peristiwa Pembunuhan Massal Berkedok Dukun Santet**

Pada bulan September dan Oktober tahun 1998 hampir setiap hari ada korban tewas ditemukan oleh masyarakat. Menurut Tim Pencari Fakta NU dikutip dalam Al-Zastrauw Ng. (1999: 98-103), sebelum operasi pembantaian dilakukan secara sistematis dan terorganisir terhadap orang-orang yang diduga sebagai dukun santet, terlebih dahulu diadakan teror pada calon korban. Bentuk-bentuk teror, antara lain sebagai berikut.

1. Memberi tanda panah merah (cat) pada dinding rumah calon korban. Atau, melempari batu rumah calon korban pada malam hari, sambil member tahu warga lainnya untuk memadamkan lampu pada hari yang sudah ditentukan. (Temuan ini diperkuat dengan pengakuan pelaku teror yang sempat ditemui oleh TPF).
2. Sejumlah orang dengan kendaraan mobil mendatangi kampung calon korban sambil pura-pura menanyakan alamat calon korban kepada tetangga dekatnya. Cara menanyakan sangat mencurigakan, sehingga warga kampung cepat panik dan bertanya-tanya “apa maksud sebenarnya sejumlah orang tersebut menanyakan alamat si S (calon korban)”.
3. Menyebarkan selebaran ala *Wanted* dengan nama-nama calon korban ditulis jelas. Selebaran ditanda-tangani resmi. Tetapi temuan TPF menunjukkan bahwa tanda tangan di selebaran tersebut palsu. Tanda tangan yang dipasang dengan tujuan agar orang tersebut diserang massa. (Temuan selebaran menggunakan tanda tangan Dansatkorcab Banser Banyuwangi, Abdillah, sehingga komandan Banser ini nyaris diserang penduduk).
4. Mendatangi keluarga calon korban yang dianggap sulit untuk ditemukan. Para “teroris” secara terang-terangan menyatakan bahwa salah satu anggota keluarganya akan dibunuh karena diketahui sebagai tukang santet. Karena tu, anggota keluarga diminta untuk segera menyerahkannya. Jika tidak, semua anggota keluarga akan dibantai. (Data ini diambil berdasar pengakuan para anggota korban pada TPF).
5. Mengancam dengan menggunakan telepon. Lewat telepon orang yang menteror menyebut segala aktivitas calon korban yang sudah diketahui. Bahkan kendaraan yang dipakai calon korban juga disebut secara rinci, kapan digunakan, pukul berapa dipakai, lewat jalur mana, dan pulang pukul berapa sudah ketahui semuanya (Al-Zastrauw Ng., 1999: 103-104).

Secara umum dampak dari peristiwa pembunuhan massal berkedok dukun santet di Kabupaten Banyuwangi tahun 1998 adalah sebagai berikut ini: 1) Hilangnya nyawa manusia dengan jumlah korban sebanyak 115 tewas (versi pemda), 176 tewas (versi kompak), dan 103 tewas (versi NU) (Sukidin, 2005: 9), 2) Peristiwa pembunuhan massal berkedok dukun santet di Kabupaten Banyuwangi tahun 1998 menimbulkan trauma mendalam bagi masyarakat Banyuwangi, 3) Para keluarga korban juga enggan untuk mengungkit-ungkit peristiwa ini karena dianggap akan mewarisi ilmu santet orang tua/keluarganya, padahal peristiwa ini telah menyebabkan kerugian nyawa,

moral, ekonomi dan hubungan sosial masyarakat, 4) Retaknya hubungan antar masyarakat, 5) Mencoreng nama baik organisasi masyarakat Nahdatul Ulama karena sebagian besar korban yang diduga dukun santet adalah Ustad, guru ngaji, dan pimpinan pondok pesantren di bawah bendera NU, 6) Peristiwa ini juga menimbulkan stigma negatif bagi Kabupaten Banyuwangi sebagai kota santet.

### **Peran NU dalam Tragedi Santet 1998**

Tim Investigasi NU mengancam akan mengungkap hasil temuannya tentang pembunuhan massal di Jawa Timur di Mahkamah Internasional. Siapa saja yang terlibat konspirasi pembantaian itu? KESABARAN selalu ada batasnya, tak terkecuali bagi Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (NU) Jawa Timur. Batas waktu yang mereka tetapkan, akhir November lalu, tentang pengungkapan kasus pembantaian di Banyuwangi telah dilewati pemerintah. Maka, Choirul Anam, Ketua Tim Investigasi NU, pun mengancam: "Jika tidak ada tindak lanjut, Pengurus Besar NU akan meneruskan kasus ini ke Mahkamah Internasional atau Amnesti Internasional." Seperti Anda tahu, kedua lembaga internasional itu dikenal luas sangat memperhatikan soal-soal pelanggaran hak asasi manusia di negara mana saja.

Tim Investigasi NU telah bekerja berbulan-bulan untuk mengungkap konspirasi pembantaian berkedok isu dukun santet itu. Data dan fakta yang berhasil dikumpulkan bisa membuat bulu kuduk Anda berdiri, misalnya soal jumlah korban tewas yang sedikitnya 253 orang. Mereka dibantai di desadesa di tujuh kabupaten di Jawa Timur: Banyuwangi, Jember, Situbondo, Bondowoso, Pasuruan, Pamekasan, dan Sampang. Korban tewas terbanyak tentu saja di Banyuwangi: 148 orang. Ada yang mati digantung atau dijerat, dibakar bersama rumahnya, dipukuli atau dibacok, dan yang paling banyak adalah dianiaya massa (lihat tabel III). Sebagian besar adalah kaum nahdliyin sendiri, di antaranya pengurus ranting NU, pengurus masjid, atau guru pelajaran mengaji.

Temuan penting lain adalah soal keterlibatan sejumlah pejabat setempat dalam pembunuhan berantai tersebut. Yang disebut-sebut dalam laporan Tim Investigasi NU itu antara lain tiga pejabat Banyuwangi: Bupati T. Purnomo Sidik, Komandan Komando Distrik Militer Letnan Kolonel Subiraharjo, dan Kepala Kepolisian Resor Letnan Kolonel Edy Moerdiono. Salah satu bukti kuat yang ditemukan adalah kopi radiogram Pak Bupati yang ditujukan kepada para kepala desa, lewat camat-camat di wilayahnya, tertanggal 10 Februari 1998, bernomor 300/70/439.0131/ 1998. Instruksinya: mendata orang-orang yang diduga berpraktik sebagai dukun santet. Tapi, menurut pengakuan Bupati Purnomo Sidik, radiogram itu dikeluarkannya 16 September 1998, saat ramai-ramainya pembantaian "dukun santet". Tujuannya, kata Sidik, menyelamatkan para dukun santet itu dari amukan massa. Hasilnya, 118 orang tercatat dalam daftar dukun santet. Nah, dari jumlah itu, yang jadi korban amukan massa hanya delapan orang, itu pun karena tak mengindahkan anjuran aparat keamanan. Tapi, bagi Tim Investigasi NU, daftar-yang entah mengapa jatuh ke tangan khala yak umum—itu justru merupakan pemicu gelombang pembantaian. Sebab, ada yang menafsirkan catatan itu sebagai "daftar target" pembunuhan. Yang jelas, "Setelah (data dan foto) itu beredar di masyarakat, korban baru bertambah banyak," kata sumber D&R di NU Cabang Banyuwangi. Kebetulan atau tidak, hampir 70 persen korban pembunuhan cocok dengan nama-nama yang ada di daftar tadi.

Fluktuasi jumlah korban juga baru melonjak selama Juli, Agustus, dan September: seratus orang lebih. Korbannya tak lagi sekadar orang-orang yang diduga berpraktik sebagai dukun santet, tapi juga sejumlah ulama setempat. Anehnya, para pelakunya juga

bukan penduduk setempat, melainkan orang-orang berpakaian ala ninja yang beroperasi dengan rapi dan sistematis.

Kemunculan “pasukan ninja itu sempat disaksikan sejumlah saksi mata yang bercerita kepada Tim Investigasi NU. Bersamaan dengan itu, pola-pola pembantaian juga berubah drastis. Dulu, putusan untuk mengeksekusi seorang dukun santet memerlukan waktu lama karena harus dimintakan konfirmasi dulu kepada warga setempat: apakah orang yang disasar itu memang mempraktikkan ilmu santet atau tidak. Jika yang mengiyakan hanya sepuluh orang, eksekusi tak jadi berlangsung. Namun, kalau sekitar 50 warga membenarkan, barulah eksekusi direncanakan. Biasanya, warga lalu keturunan untuk membayar algojo atau eksekusi dilakukan beramai-ramai.

Tapi, sejak Juli, dalam setiap aksi pembantaian muncul kelompok provokator yang tak dikenali warga setempat. Belakangan, Tim Investigasi NU berhasil mengidentifikasi para provokator itu, yang dimotori gerombolan preman dan bromocorah. Salah seorang yang pernah dituding Choirul Anam adalah Agus Indriawan, preman yang sehari-harinya berprofesi sebagai calo pengujian kendaraan bermotor di Kantor Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan (DLLAJ) Banyuwangi. Konon, Agus inilah yang bertugas merekrut para algojo—yang berasal tidak hanya dari Banyuwangi, tapi juga Surabaya dan sekitarnya. Kepada anak buahnya, Agus selalu menegaskan agar tak usah khawatir soal sepak-terjang mereka karena dijamin oleh seorang beking yang berdinasi di Kesatuan Intelijen Pengamanan Politik Kepolisian Resor Banyuwangi.

Laporan Tim Investigasi NU menyebutkan rekrutmen komplotan Agus dilakukan secara terencana dan rahasia. Di Banyuwangi, misalnya, order pembunuhan diberikan seorang pengendara motor dalam sebuah amplop tertutup. Di dalam amplop sudah tertulis nama dan alamat lengkap calon korban, lengkap dengan uang senilai Rp 500 ribu sampai Rp 1 juta. Di Jember, untuk memudahkan para algojo itu melaksanakan tugasnya, komplotan itu memberikan rambu khusus di sekitar rumah calon korban. Bila ada tanda panah merah, sang korban harus dibunuh. Yang pasti, soal keterlibatan aparat polisi juga pernah diungkapkan Camat Purwoharjo, Banyuwangi, kepada tabloid Petisi terbitan Surabaya. Menurut Pak Camat Santoso, pada 11 Februari 1998 ada pertemuan kepala-kepala desa di wilayahnya dengan Wakil Kepala Kepolisian Sektor Purwoharjo. Pada pertemuan yang tanpa persetujuan camat tersebut, pejabat kepolisian itu meminta para kepala desa mendata tukang santet dan dukun pengobatan tradisional di daerahnya. Alasannya: untuk mencegah hal-hal yang tak diinginkan karena saat itu sudah terjadi peristiwa aksi massa yang mengadili dukun santet. Ketika Pak Camat menanyakan soal instruksi pendataan itu, wakil kepala kepolisian sektor itu mengatakan semua itu perintah atasannya.

Siapa atasan yang dimaksud, tak jelas benar. Namun, Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur, Mayor Jenderal Mohamad Dayat, buru-buru membantah keterlibatan aparatnya. Ia juga menegaskan belum ada bukti-bukti ada muatan politis di balik pembunuhan massal di Banyuwangi dan kabupaten lain. Jadi, semua kasus pembunuhan itu dinyatakan sebagai kasus kriminal murni.

## KESIMPULAN

Santet tidak dapat dilepaskan dari sejarah terbentuknya komunitas masyarakat suku Osing. Santet diperkirakan berkembang setelah adanya Perang Puputan Bayu (1771-1772). Kemudian, istilah santet ini dalam kehidupan masyarakat Banyuwangi

digambarkan dalam bentuk tari *Jaran Goyang*, yang merupakan salah satu seni tradisional yang proses kelahirannya diilhami oleh tari *Seblang* dan *Gandrung*. *Jaran Goyang* terdiri dari kata *Jaran* (Kuda) dan *Goyang* (bergerak). Dalam praktek peristiwa pembunuhan massal terhadap orang yang dicurigai sebagai dukun santet pada tahun 1998 menunjukkan bahwa pembantaian ini dilakukan oleh sekelompok orang terkatih, dibantu tenaga pengatur strategi, penyandang dana, dan provokator-provokator penggerak massa serta cara kerjanya terkesan rapi.

Secara umum dampak dari peristiwa pembunuhan massal berkedok dukun santet di Kabupaten Banyuwangi tahun 1998 adalah sebagai berikut ini: 1) Hilangnya nyawa manusia dengan jumlah korban sebanyak 115 tewas (versi pemda), 176 tewas (versi kompak), dan 103 tewas (versi NU) (Sukidin, 2005: 9), 2) Peristiwa pembunuhan massal berkedok dukun santet di Kabupaten Banyuwangi tahun 1998 menimbulkan trauma mendalam bagi masyarakat Banyuwangi, 3) Para keluarga korban juga enggan untuk mengungkit-ungkit peristiwa ini karena dianggap akan mewarisi ilmu santet orang tua/keluarganya, padahal peristiwa ini telah menyebabkan kerugian nyawa, moral, ekonomi dan hubungan sosial masyarakat, 4) Retaknya hubungan antar masyarakat, 5) Mencoreng nama baik organisasi masyarakat Nahdatul Ulama karena sebagian besar korban yang diduga dukun santet adalah Ustad, guru ngaji, dan pimpinan pondok pesantren di bawah bendera NU, 6) Peristiwa ini juga menimbulkan stigma negatif bagi Kabupaten Banyuwangi sebagai kota santet.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, H. M. 2009. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Handoyo, Eko., dkk. 2015. *Studi Masyarakat Indonesia*. Yogyakarta: Ombak
- Hanifah, luluk. 2015. *Peran Keberadaan Karang Taruna Trengginas Dalam Meningkatkan Modal Sosial Pemuda (Studi Deskriptif Karang Taruna Trengginas Di Desa Purwoasri Kecamatan Tegaldimo Kabupaten Banyuwangi)* Skripsi (Tidak Diterbitkan). Jember: Juusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
- Khaidar, M. Ali. 2004. *Nahdatul Ulama Dan Islam Di Indonesia Pendekatan Fiqhi Dalam Politik*. Desertasi (Tidak Diterbitkan). Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah
- Lubis, Ridwan. 2005. *Cetak Biru Peran Agama*. Jakarta. Puslitbang
- Mulyasa, H. E. 2011. *Manajemen Pendidikan Karakter*. (Ed. Dewi Ispurwati). Jakarta: Bumi Aksara
- Nahdliyah, Amirotn. 2015. *KERUKUNAN MASYARAKAT ANTAR UMAT BERAGAMA PADA WILAYAH PEDALAMAN DI KABUPATEN BANYUWANGI (Ditinjau Dari Prespektif Sosiologi Agama)*. Dalam jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam, Vol. 7, No. 1. Halaman 16-31
- Nasikun. 2013. *Sistem Sosial Indonesia*. Yogyakarta: Ombak
- Rohman, Muhammad. 2012. *Kurikulum Berkarakter (Refleksi dan Proposal Solusi Terhadap KBK dan KTSP)*. (Ed. Umi Athelia Kurniawati). Jakarta: Prestasi Pustaka

- Sarosa, Samiaji. 2012. *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar*. (Penyunting: Bambang Sarwija). Jakarta: Permata Putri Media
- Sjoraida, Diah Fatma, dkk. 2016. *Pola Komunikasi Tokoh Lintas Agama Dalam Menjaga Kerukunan Umat Berbeda Agama Di Kota Bandung*. Dalam PROSIDING SEMINAR NASIONAL KOMUNIKASI. Bandar Lampung: Universitas Lampung
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta
- Sukmadinata, N. S.. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Suratman, Yosua Praditya. 2017. *TAKSONOMI KONFLIK-KONFLIK INTERNAL DI INDONESIA SEBAGAI POTENSI PERANG PROXY*. Jurnal Pertahanan & Bela Negara Volume 7 Nomor 1. Halaman 39-52
- Wibowo, Tri dan Muhammad Turhan Yani. 2016. *Peran Tokoh Agama Dalam Menjaga Kerukunan Antar Umat Beragama Di Desa Sekaran Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri*. Dalam jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan. Volume 02 Nomor 04. Halaman 844-858
- Widiatmaka, Pipit, dkk. 2015. *Peran Organisasi Kepemudaan Dalam Membangun Karakter Pemuda Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Pribadi Pemuda (Studi Pada Pimpinan Cabang Gerakan Nahdathul Ulama di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah)*. Dalam Jurnal Ketahanan Nasional, Volume 22 Nomor 2. Halaman 180-198
- Zubaedi. 2011. *Desain Pendidikan Karakter: Konsep dan Aplikasinya Dalam Lembaga Pendidikan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group